

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Zarman Zikri

Drs. Zulbahridar, M.Si., Ak, CA

Drs. H. Elfi Ilham, M.Ak., Ak, CA

Faculty of Economics, University of Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: Zikri_zarman21@yahoo.com

ABSTRACT

This research is a case study in Kampar regency government. The purpose of this study is to analyze the financial performance of financial ratios based on the budget and analyze non-financial performance Kampar district local government public satisfaction index based on the public service to users of the service.

In this study, the writer used descriptive analysis on Budget Realization Report by using financial ratios such as the ratio of Independence, Effectiveness and Efficiency Ratio, Activity Ratio, Debt Service Coverage Ratio, and Ratio Growth and uses Community Satisfaction Index which calculated using the weighted average value of each indicator based services Kepmen.PAN 25, 2004.

Based on the results of data analysis, it can be concluded that the financial performance of Kampar regency administration has shown the average financial performance of the stable. Where the results of the calculation of the percentage ratio of each year experiencing a positive trend. While the Community Satisfaction on Service Delivery in Kampar regency government is good. Where the results of Customer Satisfaction Index of 14 indicators of service seen in 25 Kepmen.PAN 2004 after the converted value is 71.8875 and quality of service B.

Keywords : Performance, Independence Ratio, Effectiveness and Efficiency Ratio, Activity Ratio, Debt Service Coverage Ratio, Ratio Growth, and Community Satisfaction.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi Daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-undang nomor 22 tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi dan sudah mulai

efektif dilaksanakan sejak 1 januari 2001.

Umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan sumber daya manusia (aparatur maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan keuangan, kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah kabupaten dalam

mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim : 2007).

Menurut Widodo dalam Halim (2007) terdapat beberapa analisa rasio didalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian daerah, rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio (DSCR)*, dan rasio pertumbuhan.

Menurut Dwiyanto dalam Ratih Iswari (2011) penilaian kinerja organisasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator melekat pada birokrasi seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa.

Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu badan usaha karena masyarakat adalah konsumen dari produk yang dihasilkannya. Kotler dalam Lupiyoadi (2006) mengungkapkan kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk/jasa yang diterima dan diharapkan.

Pemerintah di dalam menyelenggarakan pelayanan publik masih banyak dijumpai kekurangan sehingga jika dilihat dari segi kualitas masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan masih munculnya berbagai keluhan masyarakat melalui media massa. Jika kondisi ini tidak direspon oleh

pemerintah maka akan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah sendiri. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik (Men PAN : 2004).

Salah satu kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sehingga ditetapkan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan Instansi Pemerintah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.Pan/2/2004.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Dengan terbentuknya Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian diundangkan dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Riau. Sejalan dengan bergulirnya era reformasi, berdasarkan Undang-undang Nomor

53 Tahun 1999, Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar ibukotanya Bangkinang, Kabupaten Pelalawan ibukotanya Pangkalan Kerici dan Kabupaten Rokan Hulu Ibukotanya Pasir Pengarayan. Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru. Kota Bangkinang sebagai ibukota Kabupaten Kampar berjarak \pm 61 KM dari Kota Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau dan merupakan Ibukota Kabupaten yang terdekat dengan Pekanbaru.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nursau Tuslat (2008) mengenai analisis derajat kemandirian keuangan Kabupaten Kampar dalam otonomi daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kemandirian keuangan Kabupaten Kampar dalam penelitian ini adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) dan atau rasio PAD terhadap Total Pengeluaran Daerah (TKD). Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa ternyata Kabupaten Kampar kurang mandiri dalam pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari aspek keuangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 100-279 tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2010 kabupaten Kampar dinilai sebagai kabupaten terbaik di provinsi Riau dan pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Kampar berhasil meraih penghargaan sebagai daerah dengan pelayanan terbaik.

Dengan adanya otonomi daerah, Kabupaten memikul tugas

untuk memberikan suatu inovasi di dalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri di dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan pemerintahannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat bahkan kepada masyarakat.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR”**

Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis merumuskan yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan indikator analisis rasio kemandirian?
2. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan indikator analisis rasio efektifitas dan efisiensi?
3. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan indikator analisis rasio aktivitas?
4. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan indikator analisis rasio *debt service coverage ratio* (DSCR)?
5. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Keuangan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan indikator analisis rasio pertumbuhan?
6. Bagaimanakah Kinerja Non Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan indeks kepuasan masyarakat?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan pada APBD dan menganalisa kinerja non keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar berdasarkan indeks kepuasan masyarakat.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Pemerintah Daerah
Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja keuangan dan menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dimasa yang akan datang.
- b. Bagi Peneliti
Salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang berharga dalam menulis karya ilmiah dan memperdalam bidang yang diteliti.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dibidang ilmu akuntansi pada umumnya dan ilmu akuntansi pemerintahan pada khususnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kinerja

Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara : 2007).

Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (www.wikipedia.com).

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi.

Penilaian Kinerja Sektor publik

Pengukuran kinerja dalam sektor publik sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik di belanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Penilaian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2009) dengan otonomi terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik disbanding dengan sebelum otonomi daerah.

Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan pendapatan asli daerah. Kehadiran UU nomor 34 tahun 2000 tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya adalah momentum dimulainya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara penuh (desentralisasi fiskal).

Aspek kedua yaitu disisi manajemen pengeluaran daerah, sesuai azas otonomi daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai Reformasi Pembiayaan.

Menurut Widodo dalam Halim (2007) terdapat beberapa analisa rasio didalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.

Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah (BD) dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib

(BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Penilaian Kinerja Non Keuangan Kepuasan Masyarakat

Menurut Tse dan Wilton dalam Tjiptono (2006) disebutkan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk setelah pemakaiannya. Kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari harapan dan kinerja. Oliver dalam Tjiptono (2006) memberikan pendapat bahwa kepuasan keseluruhan ditentukan oleh ketidaksesuaian harapan yang merupakan perbandingan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Kepuasan merupakan fungsi positif dari harapan pelanggan dan keyakinan diskonfirmasi. Dengan demikian kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat merupakan respon dari perbandingan antara harapan dan kenyataan.

Kepuasan merupakan fungsi dari kesan kinerja dan harapan. Apabila kinerja berada di bawah harapan, pelanggan tidak puas, sebaliknya apabila kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas dan apabila

kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang.

Kualitas Pelayanan Publik

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk.

Salah satu produk peraturan pemerintah terbaru tentang pelayanan publik yang telah dikeluarkan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja unit pelayanan publik instansi pemerintah adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP-25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 februari 2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tepatnya pada kantor bupati kabupaten Kampar, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian.

Husein Umar (2008) mengatakan bahwa salah satu tanda penelitian ini bersifat deskriptif adalah adanya studi kasus pada penelitian tersebut, seperti yang dilakukan pada penelitian ini.

Populasi dan Sampel

- Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto : 2006). Sedangkan Husein Umar (2008) menyatakan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung unit pelayanan kantor bupati kabupaten Kampar, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kampar.

- Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto : 2006). Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti maka dalam menentukan sampel menggunakan teknik sampling aksidental (*accidental sampling*), metode ini merupakan prosedur sampling yang memilih sampel dari orang yang paling mudah dijumpai atau diakses Santoso dan Tjiptono dalam Semiaji

(2012) . Agar penelitian ini lebih fit, maka diambil sebanyak 100 responden pengunjung unit pelayanan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Dengan rincian sebagai berikut:

- Kantor bupati kabupaten Kampar sebanyak 30 orang
- Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset sebanyak 30 orang
- Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebanyak 40 orang.

Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari pemerintah daerah atau data yang terjadi di lapangan penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan jawaban responden atau masyarakat yang dituangkan dalam angket/kuesioner selama kurun waktu penelitian.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang telah ada dan tersedia baik di buku-buku literatur ataupun sumber-sumber lain. Data sekunder ini terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Kampar yaitu untuk tahun 2010-2013 serta data pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah Suatu cara mengumpulkan data dengan menanyakan langsung kepada pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terutama staf

Bagian Umum dan Bagian Keuangan.

2. Kuesioner

Kuesioner adalah pertanyaan terstruktur yang diisi sendiri oleh responden atau diisi oleh pewawancara yang membacakan pertanyaan dan kemudian mencatat jawaban yang berikan (Sulistyo-Basuki : 2006).

Kuesioner terdiri dari pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka digunakan untuk mengetahui identitas responden dan pertanyaan tertutup untuk meminta responden memilih salah satu jawaban yang tersedia dari setiap pertanyaan.

Dalam penelitian ini, jawaban yang diberikan oleh responden kemudian diberi skor dengan mengacu pada pengukuran data ordinal, yaitu dengan skala *semantic* (Ferdinand : 2006).

Dalam pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pernyataan, dengan skala penilaian dari 1 sampai dengan 4. Tanggapan maksimal diberi nilai paling besar (4) dan tanggapan minimal diberi nilai paling kecil (1).

Observasi nonpartisipan dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap catatan, dokumen dan beberapa literatur yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan melalui riset ke perpustakaan, dokumentasi dan jurnal yang telah dipublikasikan serta laporan lain yang mendukung penelitian ini.

Metode Analisis Data

Penilaian Kinerja Keuangan

1. Rasio Kemandirian

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}}$$

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan}}$$

Berdasarkan Potensi Riil Daerah Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}$$

Kriteria pengukurannya :

3. Rasio Aktivitas

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (P + B + BL)}}$$

DSCR : Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman Daerah, PAD : Pendapatan Asli Daerah, DAU : Dana Alokasi Umum, P : Pokok Pinjaman, B : Bunga Pinjaman, BL : Biaya Lain, BD : Bagian Daerah, BW : Belanja Wajib.

5. Rasio Pertumbuhan

$$\text{Realisasi Penerimaan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}}$$
$$\text{Rasio Pertumbuhan } \Sigma \text{ Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}}$$

Rasio Pertumbuhan Belanja
Pembangunan =

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } X_{n-1}}$$

Keterangan :

X_n = Tahun Yang dihitung

X_{n-1} = Tahun Sebelumnya

Penilaian Kinerja Non Keuangan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Rata-rata tertimbang atau terbobot (*weighted average*) adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan/bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang/bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

Bobot nilai rata-rata tertimbang =

$$\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$$

Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

| | | | |
|-----|---|---|-------------------|
| IKM | = | $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ | x Nilai penimbang |
|-----|---|---|-------------------|

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

| |
|--|
| $\text{IKM Unit pelayanan} = \text{IKM} \times 25$ |
|--|

GAMBARAN UMUM

Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan *Minanga Tanvar* dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Malaka terakhir, Sultan Mahmud Syah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugal, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya wafat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju Sungai Kampar. Dalam perjalanan tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung.

Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi

Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Dengan terbentuknya Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian diundangkan dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Riau.

Sejalan dengan bergulirnya era reformasi, berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar ibukotanya Bangkinang, Kabupaten Pelalawan ibukotanya Pangkalan Kerici dan Kabupaten Rokan Hulu Ibukotanya Pasir Pengarayan. Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru. Kota Bangkinang sebagai ibukota Kabupaten Kampar berjarak + 61 KM dari Kota Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau dan merupakan Ibukota Kabupaten yang terdekat dengan Pekanbaru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Rasio Kemandirian

Hasil perhitungan rasio kemandirian daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dimulai pada tahun anggaran 2010 sebesar 7.97%, turun pada tahun 2011 sebesar 5.86% pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 5.61% dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan

sebesar 7.48%, persentase perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah masih kurang stabil karena masih mengalami naik turun terhadap hasil perhitungan persentasenya.

Rasio Efektifitas dan Efisiensi

Berdasarkan perhitungan rasio efektifitas Kabupaten Kampar yaitu tepatnya diawali pada tahun 2010 sebesar 104.55 % pada tahun 2011 menjadi 107.15 % kemudian pada tahun 2012 sebesar 104.81 % dan pada tahun 2013 kembali mengalami kenaikan sebesar 120.49 %.

Pada dasarnya didalam analisis rasio efektifitas diketahui bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau maksimal 100 (seratus) persen. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sesuai hasil perhitungan rasio dapat digambarkan kemampuan daerah Kabupaten Kampar didalam menjalankan tugasnya sudah stabil karena mengalami kenaikan rasio efektifitas diatas angka 100 (seratus) persen. Maknanya, kinerja pemerintah Kabupaten Kampar sangat efektif dalam mengelola keuangan daerah. Menurut Dasril Munir dalam Febrina (2008) pengelolaan keuangan daerah dikatakan efisien apabila rasio efektifitasnya diatas 90 %.

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 (seratus) persen sedangkan menurut Dasril Munir dalam Febrina (2008) pengelolaan keuangan daerah

dikatakan efisien apabila rasionya kurang dari 80 %.

Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik. Hasil perhitungan rasio efisiensi pemerintahan daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 seluruh rasio efisiensi berada di bawah 100 (seratus) persen. Ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah didalam memungut PAD (dalam hal ini pajak daerah) sudah efisien yang ditandai dengan *trend* rasio yang kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen dari tahun ketahun. Artinya, dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit, pemerintah daerah dapat menghasilkan output (hasil) yang optimal dan memberikan penggambaran kinerja pemerintahan daerah yang baik.

Rasio Aktifitas

Dari hasil perhitungan menunjukkan sebagian besar dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar masih diprioritaskan untuk pemenuhan belanja rutin, sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD masih relatif kecil. Seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan sektor pembangunan yang mempunyai *multiplier effect* yang artinya proses yang menunjukkan sejauh mana pendapatan nasional akan berubah efek dari perubahan dalam pengeluaran agregat. *Multiplier* bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau merosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Dan pengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Rasio Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Berdasarkan laporan realisasi anggaran (LRA) APBD Pemerintah daerah Kabupaten Kampar belum pernah melakukan pinjaman daerah sebab sampai dengan tahun anggaran 2012/ 2013 pemerintah daerah Kabupaten Kampar masih memiliki sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Rp. 316,608,937,636,44. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Kampar tidak mengalami kekurangan dana yang begitu berarti untuk melakukan pinjaman daerah.

Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan hasil perhitungan, pertumbuhan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kampar sudah baik karena selama kurun waktu 4 tahun tersebut, karena secara bertahap pemerintah daerah Kabupaten Kampar mengurangi pengeluaran pada belanja rutin dan mulai memprioritaskan belanja pembangunan untuk infrastruktur daerah dan memberikan dampak kepada peningkatan pendapatan daerah dari segi pembangunan daerah.

Analisis Kinerja Non Keuangan

Hasil yang didapatkan secara menyeluruh untuk indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Kampar berdasarkan penilaian kriteria menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yaitu mutu pelayanan B serta kinerja unit pelayanan baik dan nilai indeks kepuasan setelah dikonversi adalah 71.8875.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan tersebut, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Untuk rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kampar sampai dengan tahun anggaran 2013 persentase perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah masih kurang stabil karena *trend* - nya masih mengalami naik turun terhadap hasil perhitungan persentasenya. Artinya adalah ketergantungan daerah masih sangat tinggi, terutama terhadap penerimaan dari bantuan pemerintah pusat berupa DAU/DAK.
2. Berdasarkan hasil perhitungan untuk rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, kemampuan penerimaan daerah Kabupaten Kampar sudah proporsional karena rasio yang cenderung naik pada tiap tahunnya. Kinerja pemerintah Kabupaten Kampar sudah efektif karena rasio efektifnya mencapai 1 (satu) atau 100 persen. Sedangkan untuk kinerja pemerintah didalam memungut PAD (dalam hal ini pajak daerah) sudah efisien yang ditandai dengan *trend* rasio yang kurang dari 1 (satu) atau 100 (seratus) persen dari tahun ketahun.
3. Didalam pengukuran terhadap rasio aktifitas dapat diketahui bahwa sebagian besar dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar pada tahun anggaran 2010-2013 masih diprioritaskan untuk pemenuhan belanja rutin pegawai, sehingga rasio belanja pembangunan publik terhadap APBD masih relatif kecil.
4. Pemerintah daerah Kabupaten Kampar tidak terlalu mengalami kekurangan dana yang begitu berarti sebab sesuai data tahun anggaran 2010 – 2013 pemerintah daerah Kabupaten Kampar tidak pernah melakukan pinjaman daerah karena masih memiliki sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 316,608,937,636,44 rupiah sampai dengan tahun anggaran 2013.
5. Untuk rasio Pertumbuhan APBD, kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2010 – 2013 sudah baik, karena secara bertahap pemerintah daerah Kabupaten Kampar mengurangi pengeluaran pada belanja rutin dan mulai memprioritaskan belanja pembangunan untuk infrastruktur daerah dan memberikan dampak kepada peningkatan pendapatan daerah dari segi pembangunan daerah.
6. Berdasarkan hasil analisis data, dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Kampar sudah menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang stabil. Dimana hasil perhitungan disetiap tahun mengalami *trend* positif. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar mengoptimalkan pengelolaan kekayaan sumber daya daerah yang tersedia dan pendapatan asli daerah yang diterima sebagian besar mulai terserap dengan sepenuhnya sehingga sangat berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

7. Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Pemerintah daerah Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang telah diberikan oleh aparatur pemerintah daerah telah berjalan dengan baik dimana didapatkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat dilihat dari 14 indikator sesuai Kepmen.PAN No.25.Th.2004 dengan nilai setelah dikonversi 71.8875 dan mutu pelayanan B, artinya kinerja unit pelayanan dikategorikan baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan tersebut, maka hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dapat menggunakan analisis rasio keuangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja untuk kepentingan manajemen birokrasi pemerintah serta untuk menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga ketergantungan terhadap sumber daya ekstern dapat diminimalisir.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebaiknya lagi memprioritaskan pengalokasian dana yang

dimiliki untuk belanja pembangunan sehingga semakin bertambahnya sarana dan prasarana yang diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

4. Peningkatan mutu pelayanan melalui sumber daya manusia (SDM) yang mapan dan berkualitas harus tetap dipertahankan bahkan harus ditingkatkan dengan upaya menjalin kerja sama dengan lembaga atau LSM lainnya yang bisa memberikan pelatihan berupa pelayanan prima.
5. Pemerintah daerah Kabupaten Kampar diharapkan untuk memperhatikan sarana dan prasarana pelayanan agar masyarakat merasa nyaman dengan lingkungan pelayanan dan meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan.
6. Pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat diharapkan tidak membeda-bedakan suku, ras, ataupun agama dan golongan. Pelayanan yang berkualitas secara perlahan-lahan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ke Tujuh Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Augusty, Ferdinand, 2006. *Metode Penelitian Manajemen*:

- Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi Ilmu Manajemen. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat. Mardiasmo (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Dacosta, Matheus. 2002 *Tingkat Kemandirian Kota Kupang Ditinjau Dari Aspek Keuangan Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah 1997/1998-2001*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Dwiyanto, Agus, Dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Fandy Tjiptono, 2006, *Manajemen Pelayanan Jasa*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu S. P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iswari, D A A Ratih, 2011. Penilaian Kinerja Aspek Finansial Dan Non-Finansial Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, *Tesis*, Departemen Akuntansi Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana Denpasar.
- Lupiyoadi, Hamdani. 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa*, Edisi Kedua. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Mathis, Robert L. Dan Jackson. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Mote, Frederik. 2008. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Di Puskesmas Ngesrep Semarang, *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Nurhayati, Tuti. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2009-2011), *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rismanila, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2006 - 2008, *Skripsi*, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Rivai, H. Vithzal Dan Sagala, Ella Jauvani. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori Ke Pratik*. Edisi Kedua. Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Santoso, Semiaji. 2012. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Kelas Iii Pada Rs. Roemani Muhammadiyah Semarang. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sriani, Ni Ketut. 2004. Kinerja Kpp Denpasar Dan Pemungutan Pajak Penghasilan. *Tesis* Magister Ekonomi Pembangunan Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2006. Forum Diskusi Dosen

- Akuntansi Sektor Publik. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis Pp Nomor 24 Tahun 2005*, Bpfe, Yogyakarta.
- Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Penerbit Pt. Rajagrafindo Utama. Jakarta.
- Pakaja, Samrin. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. *Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar*.
- Van, Horne 2005. *Accounting Economics*. Translation Penerbit Pt. Gramedia Pustaka Umum Jakarta.
- Widodo. 2007. "Analisis Rasio Keuangan Pada Apbd Kabupaten Boyolali" dalam Abdul Halim. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Tiga. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Yumardi, Febrina. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan Dan Peningkatan Mutu Pelayanan
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 100-279 Tahun 2012, Tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Daerah Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lppd) Tahun 2010.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kabupaten Kampar Tahun 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- Www.Wikipedia.Com